GERAK!

Wahana Pemersatu
Warga Mandiri

Edisi 1
Mei 2016

BERSATU ATAU HABIS!

Catatan Awal Perjuangan Warga Bulogading, Makassar.
Hal 3

Kita Harus Percaya Pada Kekuatan Kita Sendiri!
Hal 6

Peta Konflik Ruang Hidup di Yogya
Hal 8

Siapa Kami?

Gerak! merupakan media cetak dan online yang dikelola secara mandiri dari, oleh, dan untuk warga masyarakat. Gerak! bertujuan untuk menjadi media pemersatu warga yang mandiri dalam mengelola, merawat dan mempertahankan ruang hidupnya, serta menjadi media tandingan bagi terbitan media korporat yang memihak pada pengusaha maupun pemerintah. Gerak! didanai secara mandiri dan sukarela oleh para pegiat, simpatisan, dan pembacanya, serta tidak terikat dengan lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat apa pun.

Gerak! membuka lebar ruang partisipasi bagi anggota masyarakat mana pun yang ingin berkontribusi bagi keberlangsungan media ini misalnya menjadi kontributor di wilayah masing-masing, menjadi ilustrator, fotografer, penulis berita, atau pun donatur lepas. Kami percaya bahwa sudah tiba saatnya masyarakat membuat media yang membela kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan penguasa.

REDAKSI

Pemred: Iqbal Prasetya.
Redpel dan Editor: Bambang Triatmojo, Martuti, Paulus Riyadi, Karto Wiyatno.
Staf Redaksi: Restu Setyawan, Tian Putra, Ni Luh Putu, Fikri Firmansyah.
Perwajahan: Gunadi Wiguna.
Bendahara: Desi Tampubolon
Email: korangerak@gmail.com
Twitter: @koran_gerak
FB: Koran Gerak
Website: www.koran-gerak.com

Kabar Sedulur

Ingin mendapat kabar tentang agenda warga mandiri? Atau ingin undangan acara atau agenda warga di lingkunganmu tersebar ke jaringan komunitas kami? Silakan daftarkan nomor ponsel Anda, atau kirimkan undangan acara Anda ke nomor di bawah ini:
TRI : 0896 3345 4087
TELKOMSEL : 0813 37760 322

Njuk Piye?

Bersatu Sekarang atau Kita Semua Habis!

Jogja semakin mengkhawatirkan bagi rakyat jelata. Peta Konflik Ruang Hidup di Jogja yang bisa kita lihat dalam koran Gerak! edisi kali ini membuktikan hal tersebut. Peta konflik ruang hidup ini diambil dari data pada awal tahun 2015. Tentu saja, jumlah konfliknya bertambah besar. Ruang hidup rakyat dikepung dan dihabisi oleh pemerintah dan pengusaha rakus dari segala penjuru. Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Jogja semuanya sudah dan akan terus dirombak dan diubah jadi tambang, industri wisata, industri air, bandara, hotel, apartemen, water boom, jalan layang, pembangkit listrik, dan lainnya.

Pemerintah dan pengusaha beralasan ini adalah pembangunan. *Kosek. Ono sing wagu. Awake dhewe kudu wani takon*: Pembangunan untuk siapa? Siapa yang membangun? Siapa yang untung? Siapa yang digusur? Siapa yang kehilangan tanah dan mata pencaharian? Siapa yang dapat untung?

Saat tambang pasir besi berdiri di Kulonprogo, pemilik pabrik untung besar tapi ribuan petani kehilangan tanah dan sawah. Saat bandara berdiri, pengembang industri transportasi untung besar, tapi ribuan petani kehilangan sumber penghidupan. Saat hotel dan apartemen berdiri, pemilik hotel dan apartemen kejatuhan rejeki nomplok tapi warga setempat digusur atau kekeringan air. Saat jalan-jalan 'ditertibkan', pengusaha toko-toko elit dapat untung, tapi pedagang kaki lima buntung. Dengan kata lain, dibalik pembangunan gila-gilaan ini, tumbalnya adalah kita: rakyat jelata.

Pemerintah dan pengusaha menghalalkan segala cara untuk menghabisi kita, mulai dari jalur hukum hingga kekerasan. Masih ingat UU Keistimewaan? Dengan alasan "Jogja Istimewa", pemerintah menciptakan Undang-Undang untuk memuluskan pencaplokan dan klaim kepemilikan tanah rakyat oleh Kasultanan dan Kadipaten. Lihat saja di Pundungsari, Kecamatan Semin, Gunungkidul. ± 150 sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan dibatalkan statusnya oleh BPN atas permintaan Kasultanan (melalui lembaga pertanahan Kraton/Panitikismo) dengan alasan asal-usul tanah tersebut adalah tanah SG. Pembatalan tersebut sepihak karena tanpa melalui proses hukum. Status Hak Milik dicoret dan ditulis ulang jadi Hak Pakai! Di Kulonprogo, tanah yang bersertifikat hak milik dan/atau sudah digarap petani secara mandiri selama puluhan tahun kini diklaim sebagai tanah Pakualaman. Ribuan petani yang sudah berhasil bertani dan menyejahterahkan dirinya secara mandiri siap digusur dari ruang hidupnya supaya tambang pasir besi dan bandara baru bisa berdiri. Yang paling massif skalanya adalah perampasan hak tanah milik desa melalui pembalikan nama sertifikat tanah desa. Gubenur menerbitkan Pergub DIY No 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mewajibkan pemerintah desa melalui bupati melakukan permohonan balik nama atas sertifikat tanah desa di wilayah masing-masing: dari milik desa menjadi milik Kasultanan/Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum warisan budaya (swasta), dengan alasan asal-usulnya adalah tanah Sultanat Ground/ Pakualaman Ground. Akibatnya, kekayaan desa beralih menjadi milik swasta yang dilindungi Gubernur dan akan memengaruhi penataan ruang yang berdampak sosial-lingkungan secara luas.

Tak hanya hukum, pemerintah dan pengusaha juga tak sungkan menggunakan kekerasan untuk membungkam rakyat jelata, baik lewat kekerasan psikis maupun fisik, baik lewat preman maupun lewat aparat negara. Sudah tak terhitung berapa banyak korban kekerasan aparat di pusat-pusat konflik. Baru-baru ini aparat negara melakukan kekerasan pada petani-petani Kulonprogo yang menolak tanahnya dipatok untuk dijadikan bandara. BPN bahu-membahu bersama polisi memaksa mematok tanah warga yang menolak bandara. Lelaki, perempuan, dewasa, anak-anak dipukuli, ditendangi, diburu, dan diinjak-injak. Beberapa tahun silam preman bayaran perusahan juga menyatroni, mengintimidasi warga, merusak dan membakar posko-posko penolakan tambang pasir besi di Kulonprogo (dengan pengawalan aparat!). Pemerintah, polisi dan preman bahu-membahu mengancam kehidupan warga yang sudah adem-ayem.

Singkatnya, para penguasa sudah bersatu dan bahu-membahu dengan segala cara untuk menindas kita, rakyat jelata. Sekarang, bagaimana dengan upaya kita sendiri? Seperti hasil belajar Martono dan petani-petani di Kulonprogo dalam 4 tahun perjuangannya melawan pembangunan bandara, tak banyak pilihan lain bagi warga selain membangun kemadirian dan kekuatan sendiri di wilayah kita masing-masing karena tangan rakus pengusaha dan pemerintah cepat atau lambat pasti akan sampai di depan rumah kita. Kalau warga kuat, perlawanan juga pasti kuat. Sambil membangun kekuatan kita sendiri, sudah tiba saatnya bagi kita untuk bergandengan tangan dan berangkulan, membangun aliansi masyarakat yang mandiri untuk bersatu melawan raksasa yang terlalu besar untuk kita lawan sendirian. Pertemuan rutin dan silahturahmi antar warga baik internal maupun lintas wilayah harus senantiasa kita pelihara, aliansi-aliansi dalam aksi massa untuk melawan pemerintah dan pengusaha harus senantiasa kita semarakkan, saling bantu dan dukung sesama warga harus senantiasa kita kedepankan karena semakin hubungan kita erat, semakin luas pula warga Jogja akan tahu tentang kondisi di wilayah kita masing-masing.

Dan dari semuanya, perlawanan yang utama adalah di lahan, di tanah masing-masing. Seperti yang ditunjukkan oleh petani-petani Kulonprogo, pematokan tanah relatif lambat dieksekusi karena warga tetap bertahan menduduki dan menjaga tanahnya masing-masing di lapangan. Seperti yang ditunjukkan oleh warga Bulogading, Makassar, penggusuran terpaksa ditunda karena warga bersatu menduduki lahan dan mempertahankan tanahnya dari gusuran.

Kita harus bersatu sekarang, atau kita semua habis!

MARI JAGA SILAHTURAHMI, MARI PERKUAT PERSATUAN SESAMA WARGA MANDIRI

Upaya Meniup Bara Menjadi Api:

Catatan Awal Perjuangan Warga Bulogading, Makassar.

Oleh Titin Jayalangkara dan Patriawan

Serakan batu, bongkahan bangunan, besi, kayu dan bentangan spanduk, menjadikan Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan, tak ubahnya lokasi perang kota yang membuat bulu kuduk merinding.

Kawasan Jalan Somba Opu yang pada hari-hari biasa adalah sentra perhiasan emas dan oleh-oleh khas Makassar, bahkan salah satu akses menuju Pantai Losari, hari itu lumpuh dan mencekam. Toko-toko sepanjang jalan itu tutup, aktifitas perekonomian sontak terganggu.

Ya, Rabu, 12 Agustus 2015 itu, memang menjadi hari meresahkan bagi warga Bulogading. Bagaimana tidak, Pengadilan Negeri Makassar berencana mengeksekusi permukiman warga. Sejak pukul empat dini hari, warga yang dibantu barisan solidaritas yang terdiri dari militan berbagai kelompok, telah mempersiapkan pertahanan untuk menghalau eksekusi dan penggusuran. Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai barikade disebar di sepanjang Jl. Somba Opu.

Pagi harinya, barisan solidaritas semakin banyak berdatangan dan membuat sepanjang jalan dipenuhi para pemuda dari berbagai penjuru Makassar yang berbaur dengan warga Bulogading. Barisan perlawanan menempati posnya masing-masing, sesuai dengan hasil kesepakatan. Ibu-ibu Bulogading bersama barisan anak-anak justru mengambil tempat paling depan dalam barisan. Mereka dengan semangat meneriakkan yel-yel "*Bulogading siap mati!*" dan bernyanyi "*lawan mafia dan tolak penggusuran*". Yel-yel dan nyanyian tersebut menjadi penyemangat.

Di barikade sebelah utara, tumpukan ban bekas yang sengaja dibakar menyemburkan api dan menambah dramatis suasana pagi itu. Sekejap, Jalan Somba Opu menjadi pusat perhatian warga di Makassar, melalui pemberitaan di media massa dan sebaran informasi di internet.

Jika menilik surat putusan PN Makassar yang diterima warga, aparat akan melakukan eksekusi pada pukul 09.00 WITA. Jam setengah tujuh, belum ada tanda-tanda berarti bahwa eksekusi yang akan jadi dilaksanakan. Meskipun begitu, di sekitar Somba Opu, tersebar aparat kepolisian dan staf Pemerintah Kota yang berjaga-jaga.

Beberapa saat kemudian, suasana memanas. Sebabnya, sejumlah polisi datang mendekat ke barikade, dengan maksud berdialog dengan warga. Namun massa yang memang tidak percaya pada aparat kepolisian menolak berdialog dan mengusir mereka.

GERAK!

Kejadiannya berlangsung cepat sekitar 15 menit. Belum lagi berdialog, mereka kemudian berlarian menjauhi lokasi akibat kejaran massa yang bersenjatakan parang, tombak, serta ketapel.

Setelah situasi kembali tenang. Massa di barikade bergegas kembali berjaga di pos masing-masing. Sekitaran jam 8, giliran Humas Pemkot Makassar mendatangi lokasi. Namun pejabat Pemkot Makassar itu pulang sebelum sempat mengutarakan maksud ke warga. Disusul kemudian belasan aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar datang dan mendekat ke area yang telah diblokade warga.

Satpol PP itu bermaksud mengajak warga berunding, 'berdialog' dengan warga, dan menawarkan 'bantuan', dan meyakinkan bahwa mereka di pihak warga. Pasalnya, beberapa obyek yang ada di lahan sengketa namun tidak masuk dalam gugatan, adalah aset Pemkot, yakni Kantor Kelurahan Bulogading dan Posyandu. Pemkot Makassar memang lagi pusing akibat sering dikecam karena banyak aset pemerintah berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lepas ke pengusaha. Tidak mau lagi kehilangan muka, inilah motif mengapa Pemkot Makassar mengirimkan pasukannya ke lokasi untuk, katanya, bersama-sama warga menghalau eksekusi.

Untunglah warga dan barisan solidaritas tidak mudah terilusi oleh tawaran tersebut. Mempercayai bahwa aparat kekerasan dan lumpen tengik seperti Satpol PP dapat menjadi sekutu di saat-saat seperti ini bukanlah akal sehat. Terlebih lagi, Satpol PP Makassar sudah sering menjadi momok bagi pedagang kakilima yang berjualan di Pantai Losari, tempat beberapa warga Bulogading juga pernah menjadi korban. Dan sekalipun perkataan mereka betul, bahwa mereka datang untuk membantu warga, tidaklah mungkin aparat Pemkot Makassar berkonfrontasi langsung dan terbuka dengan sesama aparat negara lainnya, semisal petugas dari pengadilan atau kepolisian.

Dalam hal ini, barisan massa di barikade telah bertindak benar. Tidak mudah percaya dengan omongan seperti itu, dan tidak tergoda untuk menjadi bijaksana, dengan menerima dan 'beraliansi taktis' dengan musuh dalam selimut.

Warga menolak negosiasi, dan para pemuda mengusir mereka untuk menjauh dari lokasi. Senasib dengan polisi sebelumnya, para Satpol PP yang sehari-harinya bangga membongkar dagangan dan lapak PK5 dan warga miskin lainnya ini juga berlarian ketakutan menjauhi lokasi.

Meskipun hingga pukul 10, tidak ada tanda-tanda eksekusi akan dilaksanakan, massa terus berjaga-jaga. Menurut laporan informan aksi, polisi berpakaian preman telah disebar di sekitar kawasan, beberapa truk Dalmas dan *water cannon* disiagakan di Polrestabes Makassar.

Pos-pos semakin disiagakan sehingga orang-orang yang melintas dan bermaksud masuk ke Bulogading dibatasi. Ini menimbulkan ketegangan dengan beberapa wartawan dan beberapa pihak lainnya. Beberapa orang yang berjaga di pos depan berkeras untuk melakukan pemeriksaan ID Card. Sterilisasi ini semakin diperketat setelah beberapa orang tak dikenal yang dicurigai sebagai intel, dikejar oleh massa karena menyusup ke barisan. Dan informasi yang didapatkan di lapangan, beberapa intel menyamar menjadi wartawan.

Setelah delapan jam berjaga-jaga, akhirnya sekitar pukul 11 pihak PN Makassar mengirimkan surat ke warga perihal penundaan eksekusi. Penundaan ini disebabkan kuatnya efek tekanan ke PN, Pemkot dan kepolisian melalui aksi penolakan, barikade dan penutupan.

Efek dari aksi ini tidak bisa dibilang kecil. Informasi yang didapat, akibat penutupan kawasan Somba Opu dan sekitarnya selama kurang lebih 8 jam saja, yang disusul dengan berhentinya aktivitas niaga dan pariwisata di kawasan Somba Opu, telah menyulut kerugian hingga 30 milyar rupiah. Perhitungan ini berdasarkan kalkulasi jumlah uang beredar per jam di Somba Opu.

Belum lagi, beberapa pengusaha di sekitar Bulogading juga khawatir efek eksekusi akan benar-benar sesuai dengan tulisan di salah satu spanduk, "Bulogading Digusur, Somba Opu Terbakar!"

Namun penundaan bukanlah pembatalan eksekusi sebagaimana tuntutan warga Bulogading. Karenanya warga tidak mau lengah dan berkeras untuk terus berjuang menolak penggusuran dan membatalkan eksekusi.

Secara geografis dan tata kota, posisi Kampung Bulogading memang berada di area yang strategis. Dekat dengan kawasan niaga, wisata, dan bisnis utama, menjadikannya sebagai kawasan "kelas A". Sementara lokasi ini *justru* hanya ditempati warga sebagai "permukiman biasa". Inilah yang menyebabkan Bulogading diincar para bajingan dan mafia.

Kampung Bulogading sendiri adalah salah satu perkampungan tertua di Makassar. Keberadaannya lebih dulu sebelum berdirinya Indonesia. Kampung Bulogading mulai berdiri tahun 1926, yang awalnya dikenal sebagai Kampung Berua (Kampung Baru). Kampung ini telah dihuni dan ditempati warga hingga hari ini. Sebuah sumur tua menjadi tanda keberadaan kampung ini yang sudah lama.

Di tahun 1926, Dg. Beloa dan beberapa penduduk kampung lainnya merupakan penghuni pertama yang mendiami Bulogading. Saat itu status mereka masih sebagai penyewa dari pemilik tanah yang bernama Chong Lie. Sebelum UU Pokok Agraria Tahun 1960, tanah ini masih berstatus *eigendom verponding* (tanah hak barat). Setelah pemberlakukan UU PA, tanah ini diatur sesuai ketentuan tersebut hingga sekarang.

Sengketa tanah di Bulogading ini bukanlah kasus baru, melainkan sudah bergulir sejak 1973. Nah, di sinilah keanehannya. Status warga Kampung Beru, setelah 1945, dinyatakan sebagai "penduduk lama", dan kemudian diberi surat kepemilikan. Bukti kepemilikan tersebut sayangnya ikut terbakar pada 10 Oktober 1950 silam, terkait pemberontakan Aziz. Sejak saat itulah, pemerintah mewajibkan warga untuk membayar IPEDA (semacam PBB) bersamaan dengan pembangunan kembali rumah mereka.

Pada tahun 1960, terbit sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama NV. Handeling Hasjim Dg. Manappa. Sertifikat HGB inilah, yang masa berlakunya berakhir pada tahun 18 September 1980, yang dijadikan dasar oleh penggugat pada gugatan pertama di tahun 1973.

Kini di Bulogading, beberapa warga justru telah memegang Sertifikat Hak Milik, yang notabene hierarki legalnya lebih tinggi ketimbang HGB, dan tidak mungkin terbit tanpa runutan legalitas di bawahnya. Inilah mengapa warga geram, mengapa pengadilan bisa memenangkan HGB yang kadaluarsa. Badan Pertanahan Nasional Makassar malahan sudah dua kali menolak perpanjangan HGB, tahun 1993 dan 2008, karena di atas tanah tersebut, warga Bulogading telah memiliki SHM.

Tentu saja dalam kasus tanah, negara bukanlah pihak netral yang bisa mengakomodasi semua pihak. Sebagaimana kasus-kasus agraria yang menimpa rakyat miskin, banyak sekali keganjilan yang dipaksakan. Menurut Moh. Maulana, salah satu penasehat hukum warga Bulogading, beberapa fakta tersebut antara lain bahwa pada saat bergulirnya kasus ini pertama kali, warga justru tidak pernah mengetahui bahwa tanah mereka telah digugat, dan PN Makassar memenangkan penggugatnya. Akhirnya pada tahun 1982, Mahkamah Agung menginstruksikan untuk membuka kembali persidangan, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh PN Makassar.

Selain itu, dari 43 orang yang tergugat, hanya 20 orang yang tergugat materil, sementara 23 orang lainnya telah meninggal dan sisanya adalah nama yang tidak pernah beralamat atau berdomisili di objek sengketa. Bahkan, bila gugatan tersebut mengacu pada hampir keseluruhan kampong Bulogading, nyatanya banyak warga yang menempati tanah tersebut turun-temurun tidak masuk dalam gugatan. Obyek-obyek seperti Kantor Lurah Bulogading dan Posyandu, adalah beberapa di antaranya.

Kasus ini terus berlanjut. Akan tetapi, menurut kuasa hukum warga, tidak pernah dilakukan Persidangan Setempat, yang melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung N0. 7/2001. Inilah yang menguatkan indikasi praktek mafia peradilan dalam putusan tersebut.

Apalagi kesimpulan yang dilakukan pada 5 Agustus 2009 dan pembacaan putusan 29 Oktober 2009, menjadikan sidang tertunda selama 11 minggu. Dengan waktu penundaan yang cukup lama ini, memungkinkan terjadinya negoisiasi antara para penggugat dan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut sehingga hasil putusan dapat menguntungkan pihak penggugat.

GERAK!

Menurut informasi, ini sebenarnya jual-beli perkara. Pengakuan Hj. Saadiah, ahli waris yang terdaftar sebagai penggugat, kepada warga beberapa tahun lalu bahwa dia tidak pernah menggugat warga, menguatkan indikasi tersebut. Praktik ini seringkali terjadi dengan melibatkan mafia tanah dan aparat hukum.

Dari perbincangan dengan beberapa kawan, serta informasi dari kawan-kawan jurnalis, ada informasi yang menguatkan bahwa di belakang perkara ini berdiri beberapa nama pengusaha hotel, properti dan otomotif, serta pejabat tinggi di daerah ini. Hal ini bukanlah informasi mengagetkan, mengingat tindak-tanduk beberapa nama ini sudah malang-melintang dalam kasus-kasus agraria melawan rakyat miskin perkotaan di beberapa kampung di Makassar.

Menyadari bahwa ancaman penggusuran dan eksekusi masih mengintai, warga masih bertahan di Bulogading dan mengusahakan segala cara untuk membatalkan eksekusi. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, seperti kekalahan warga Pandang Raya tahun 2014 lalu, warga Bulogading dan barisan solidaritas menyadari bahwa langkah hukum apa pun yang dilakukan tidaklah menjamin sepenuhnya bahwa mereka akan terhindar dari perampasan tanah dan penggusuran. Dalam hal ini, jalur hukum bukanlah penentu, meski tetap dilakoni sebagai salah satu taktik, dan tetap percaya dengan aksi-aksi massa seperti penghalauan secara fisik.

Penghalauan secara fisik, melalui barikade, perlawanan massa, dan tekanan langsung, bukan saja untuk melawan secara langsung aparatus kekerasan negara, melainkan juga untuk mendidik warga bahwa hanya dengan kekuatan sendirilah kita bisa bersandar. Mengingat kuantitas dan logistik pertahanan warga dan kerabatnya kalah jauh dari jumlah aparat polisi, maka inilah fungsi penting dari bangunan jaringan solidaritas yang terbangun secara mandiri di Makassar.

Karenanya, warga dan barisan solidaritas berusaha menghimpun lebih banyak lagi kekuatan dari berbagai kalangan. Namun, bukan berarti aksi-aksi tersebut adalah jaminan mutu. Keberhasilannya bergantung pada banyak faktor, termasuk soliditas dan kerapian barisan di lapangan.

Perjuangan warga memang tidaklah mudah, juga tidak seindah cerita-cerita heroik. Selain menghadapi negara dan aparatnya, warga juga menghadapi banyak taktik pecah-belah, intimidasi, bahkan teror dan pengintaian dengan cara dan peralatan yang canggih. Misalnya, berselang dua minggu setelah penggagalan eksekusi, tepatnya pada 21 agustus 2015 lalu, beberapa warga yang sedang berjaga malam dikejutkan dengan kehadiran sebuah *drone* (pesawat tanpa awak) di atas pemukiman mereka. Dicurigai *drone* tersebut bermaksud mengintai situasi dan pergerakan warga. Beberapa warga dengan tangkas berusaha menembaki pesawat tersebut menggunakan ketapel panah namun gagal.

Pada tengah malam di hari yang sama, beberapa polisi berpakaian preman sedang berlalu-lalang di sekitaran Jalan Somba Opu. Warga pun resah dibuatnya, lalu menghampiri dan mengusir polisi tersebut. Diketahui pula telah terjadi aksi penurunan spanduk yang bertuliskan "*Bulogading tergusur, Somba Opu terbakar*". Warga mencurigai hal ini dilakukan oleh pihak yang merasa tidak senang dengan kampanye masif yang dilakukan warga sebab ada seruan untuk menurunkan spanduk yang dipasang oleh warga pada malam itu.

Kini warga Bulogading terus berikhtiar mempertahankan haknya. Solidaritas pun terus mengalir. Meski proses intimidasi dan taktik pecah-belah terus dilakukan oleh pengusaha dan mafia tanah, namun kekuatan masih terus dijaga. Hal tersebut justru semakin menguatkan simpul warga Bulogading, karena sadar bahwa proses intimidasi ini justru menunjukkan ketakutan dari para mafia atas perlawanan warga dan kawan-kawan lainnya.

Untuk memperkuat perjuangan rakyat di Bulogading, maka tentu perlu melakukan pembenahan serius. Dengan begitu, otomatis hal tersebut memerlukan serangkaian kritik untuk membantu melihat sisi-sisi yang harus dibenahi.

Dalam pandangan kami, ada dua hal yang harus dibenahi dalam perjuangan warga Bulogading. Pertama adalah barisan solidaritas yang terbangun haruslah solid dan tidak kontra-produktif dengan perjuangan warga. Barisan solidaritas harus menjelma menjadi tambahan kekuatan baru, dan bukan beban bagi perjuangan warga. Untuk menjadi tambahan kekuatan, para militan yang bersolidaritas haruslah mampu membagi diri dalam kerja-kerja yang terkoordinasi.

Barisan solidaritas ini juga harus siap menjelma menjadi kekuatan tempur atau milisi pemukul terhadap kekuatan anti-rakyat. Milisi ini, dalam bayangan kami, akan berhadap-hadapan dengan aparatus negara, para lumpen pengecut yang biasanya bersembunyi di balik seragam ormas-ormas fasis.

Kedua, warga harus serius menata diri. Kekuatan dan otonomi warga Bulogading merupakan aspek paling penting. Di Bulogading, terbangun sebuah Forum Warga sebagai wahana demokratik bagi warga mengkonsolidasikan diri. Namun, kondisi tersebut masih jauh api dari panggang. Ini merupakan hal penting yang harus dibenahi secara serius oleh warga Bulogading, kaum revolusioner di Makassar, dan komunitas-komunitas warga tengah yang berjuang melawan penindasan dan ancaman perampasan tanah.

Forum Warga Bulogading dan Forwa-forwa lain, mestilah bertransformasi secara esensial, menjadi dewan komunal atau dewan rakyat. Organ ini yang menjadi embrio revolusioner, tempat seluruh pengambilan keputusan berlangsung secara mandiri dengan proses demokrasi langsung. Dewan-dewan inilah yang pada nantinya akan mengikis patronase dan budaya diam dalam masyarakat, termasuk juga otonomi terhadap pihak luar seperti partai, LSM, maupun aktivis mahasiswa.

Namun tentu saja semua itu bukanlah hal gampang dan cepat. Dibutuhkan kerja-kerja yang tekun untuk membangun kekuatan tersebut. Pengorganisasian rakyat dan pembangunan jejaring solidaritas yang organik adalah upaya untuk meniup bara-bara perlawanan yang ada di mana-mana, untuk membesar menjadi api revolusioner.

Penulis adalah anggota Perhimpunan Merdeka, Makassar.

Kita Harus Percaya Pada Kekuatan Kita Sendiri!

Oleh Iqbal Prasetya, Karto Wiyatno, dan Gunadi Wiguna.

"Curangnya pemerintah ya di situ. Pemerintah nekad mematok tanah warga WTT. Padahal, dulu pemerintah sepakat bahwa tanah warga yang menolak bandara tidak boleh dipatok. Tapi tetap saja mereka curi-curi mematok tanah warga yang menolak,"

cerita Martono, koordinator Wahana Tri Tunggal (WTT), organisasi warga Kulonprogo yang menolak pembangunan bandara selama 4 tahun belakangan. Martono merupakan salah satu warga yang menceritakan perlawanan WTT saat kunjungan silahturahmi Gerak! pada Minggu (13/3).

Sambil disaksikan oleh kawan-kawan seperjuangannya di WTT, Martono menceritakan intimidasi dan represi yang pecah satu bulan silam saat BPN Kulonprogo mematok tanah warga demi pembangunan bandara. Polisi bersikeras mendobrak barisan warga yang menolak pematokan.

Warga yang mempertahankan tanahnya dipukuli dan ditendangi oleh polisi. Bahkan, sejumlah anak-anak kecil sempat terinjak-injak saat polisi membubarkan warga yang berkumpul. Ada pula warga yang dicekik dan jatuh pingsan. Beberapa barang milik petani seperti motor dan meja bibit tanaman cabai dipekarangan juga rusak. Seorang ibu juga sempat hampir diborgol dengan paksa.

"Pematokan diberitahukan secara mendadak, tidak sampai satu minggu. Jadi, dikondisikan bagaimana caranya supaya warga menerima saja pematokan itu. Aparat yang diturunkan juga banyak sekali," ujar Martono lagi.

Megaproyek Bandara Internasional Kulonprogo sendiri termasuk dalam proyek bertaraf nasional, yaitu MP3EI. Tidak tanggung-tanggung, ongkos yang digelontorkan mencapai US$ 500 juta. Pemerintah DIY beralasan, proyek ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memajukan dan menjadikan Kulonprogo sebagai daerah kebanggaan. Alasan ini tentu berseberangan dengan kenyataan di lapangan. Sekitar 11.000 jiwa di 6 desa yang sebagian besar merupakan petani mandiri terancam tergusur dari tanah yang telah mereka garap bertahun-tahun.

"Saya heran. Kita ini sudah punya tanah, air tinggal ambil, makan tinggal petik dari lahan sendiri, lah masak mau digusur terus disuruh nyewa, disuruh jadi buruh. Saya tidak habis pikir," tambah Fajar, salah seorang petani WTT yang saat itu juga ikut berbincang.

Pemerintah DIY mengklaim bahwa tanah yang telah digarap warga selama bertahun-tahun merupakan Pakualaman Ground (PAG). Padahal, banyak dari warga memiliki sertifikat hak milik atas tanahnya, dan telah menggarap lahannya selama belasan bahkan puluhan tahun.

"Jadi, tidak ada pilihan selain menduduki dan menjaga lahan saat pematokan berlangsung. Kalau tidak dijaga, sudah sering pemerintah mematok lahan warga yang menolak bandara," Martono menjelaskan.

Kekerasan dan intimidasi bukanlah satu-satunya cara yang dilakukan pemerintah untuk menggolkan ambisinya. Janji-janji manis, sosialisasi terbatas, dan pelatihan kerja sudah sering dilakukan pemerintah untuk mencairkan hati masyarakat.

PT. Angkasa Pura, pihak yang menjalankan pembangunan bandara, sejak awal sudah melakukan negosiasi hingga membagi-bagikan uang saat pertemuan dengan warga. Martono bercerita, dulunya banyak warga yang tergiur dengan uang cepat tanpa memikirkan dampaknya pada ruang hidupnya nanti. Balai Pelatihan Kerja (BLK) juga melakukan sosialisasi lewat pelatihan-pelatihan kerja yang diklaim untuk mempersiapkan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terampil saat bandara telah beroperasi nanti.

"Tapi pelatihannya aneh dan tidak sesuai. Misalnya, pelatihan menjahit, kerajinan dan lain sebagainya yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan di bandara," jelas Martono.

Alasan yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah ataupun perusahaaan adalah bahwa pembangunan Bandara akan menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, warga sudah tidak percaya dengan cerita klise ini. Martono masih ingat bagaimana salah satu saudaranya kini jadi buruh kurir di bandara yang berpenghasilan tak seberapa. Tanahnya terlanjur dijual karena termakan janji-janji pengembang bandara tentang kerja di bandara yang katanya berupah tinggi. Kini saudaranya tersebut tak punya tanah, tinggal harus menyewa, bertani sudah tak bisa, dan menghabiskan hidupnya menjadi buruh murah.

"Kalau buruh bandara itu paling berapa tahun sih masa kerjanya? Paling-paling 50 tahun sudah pensiun. Tapi pertanian memberikan penghidupan bagi orang-orang yang sudah tua. Di sini banyak petani-petani tua. Terus petani-petani tua itu mau disuruh kerja apa kalau tidak bertani?," tanya Fajar.

Membangun Perlawanan yang Mandiri

Di tengah aktivitas utamanya, yaitu bertani, warga terus mengupayakan bentuk-bentuk perlawanan yang mandiri. Di sepanjang jalan-jalan di desa-desa warga, banyak terpampang spanduk dan baliho penolakan bandara. Aksi massa di pusat-pusat pemerintahan juga kerap dilakukan. Dana kegiatan-kegiatan perlawanan ini bersumber dari iuran mandiri warga tanpa donatur manapun. Warga mengumpulkan dana dari setiap pertemuan dan acara rutin, seperti mujahadah.

"Kalau dana sendiri kan enak. Kita sendiri bisa mengatur arah kita. Lain kalau dana dari donatur. Bisa jadi donatur punya agenda lain," ungkap Hamdi, anggota WTT yang lain.

Peran pemuda juga menjadi hal yang tak terpisahkan dari kekuatan perlawanan warga. Permimpunan pemuda WTT yang menolak bandara pun dibentuk, namanya Predator. Perhimpunan pemuda ini turut membantu aktivitas perlawanan, seperti membuat spanduk, baliho, ataupun bergabung dengan aksi massa.

Seiring berkembangnya polemik pembangunan Bandara Internasional yang terus berlangsung, sebagian warga dulu yang pro bandara atau menolak dengan syarat, lambat-laun mulai sadar dan menunjukkan solidaritasnya untuk menolak pembangunan bandara. Warga yang dulunya pro pelan-pelan mulai menyadari bahwa pembangunan hanya akan menguntungkan segelintir orang saja, yaitu pemodal.

Menurut skema MP3EI, DIY sendiri diproyeksikan menjadi salah satu pusat MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran)—tempat sirkulasi modal diputar lewat bisnis pertemuan, hiburan, konvensi, pameran, dan pariwisata. Itulah sebabnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarananya tengah digenjot.

Bandara di Kulonprogo adalah salah satu pintu masuk utamanya. Dari pintu masuk ini, telah menyambut hotel-hotel, kondotel, apartemen, taman hiburan, water boom, pusat pameran dan pertemuan, dan lainnya. Seperti halnya petani Kulonprogo yang terancam digusur dari ruang hidupnya, warga-warga lain yang ruang hidupnya bentrok dengan proyek-proyek besar ini mengalami nasib serupa: tersusir dari ruang hidupnya, serta menjadi penonton dan buruh murah dari perputaran modal yang hanya memenuhi kantong investor proyek-proyek tersebut.

"Tolok ukur penggusuran di seluruh DIY adalah bandara Kulonprogo. Kalau bandara jadi, maka seluruh Kulonprogo akan terjadi penggusuran, baik itu industri di Sentolo, air mineral, Karangwuni ke timur dengan tambang pasir besi, perumahan, jalan layang, bahkan terminal baru. Kita menganggap pemerintah terlalu rakus untuk mencaplok tanah warga," kata Martono.

Bagi petani WTT, penolakan Bandara merupakan sebuah keniscayaan. Jalur legal-formal yang sudah ditempuh hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) belum menuai hasil hingga saat ini. Maka, yang terpenting bagi warga saat ini adalah terus berikhtiar dan membangun kekuatan yang mandiri dan perlawanan yang otonom di tempatnya masing-masing.

"Yang terpenting adalah otonomi perlawanan di wilayah masing-masing. Apa artinya orang lain mendukung sekuat apa pun kalau masyarakat terdampak setempat malah tidak kuat? Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita selalu mandiri untuk melawan kebijakan pemerintah. Kemandirian harus tetap kita pegang," tegas Martono.

Martono dan warga WTT percaya, jika warga setempat sudah kuat dan militan, hal tersebut akan membuahkan hasil dengan sendirinya. Saat warga di masing-masing tempat sudah kuat dan mandiri, maka persatuan dengan warga lain untuk melawan kebijakan pemerintah menjadi hal yang selanjutnya penting untuk dilakukan.

"Saat masing-masing sudah kuat, tidak ada salahnya kita berangkulan, bergandeng tangan untuk melawan program pemerintah yang menyengsarakan rakyat, apa pun namanya. Sembari kita mandiri, kita juga harus punya kawan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain," tutup Martono.

GERAK!

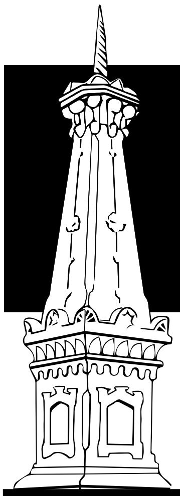

Peta Konflik Ruang Hidup di Yogya

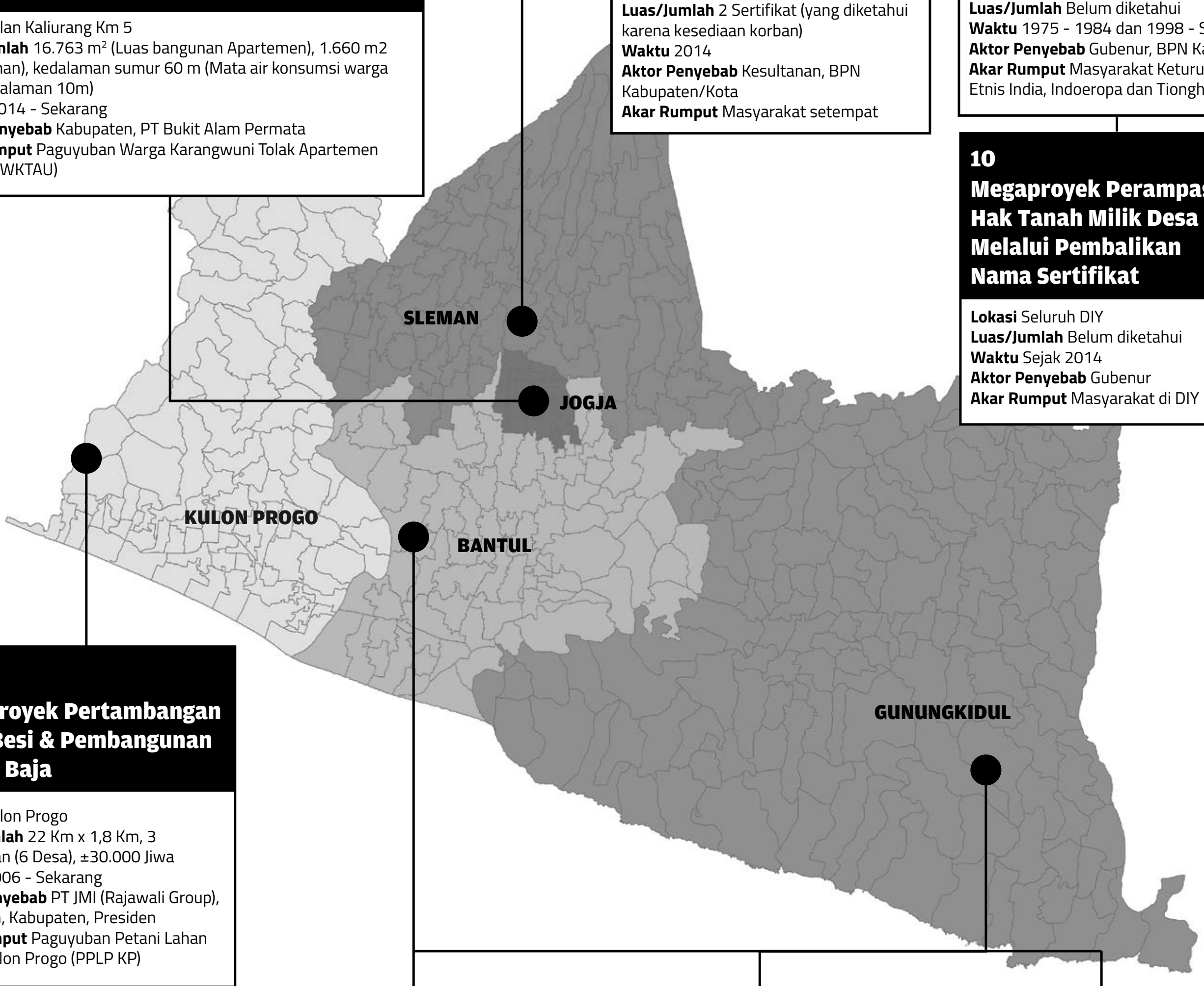

01
Megaproyek Pertambangan Pasir Besi & Pembangunan Pabrik Baja

Lokasi Kulon Progo
Luas/Jumlah 22 Km x 1,8 Km, 3 Kecamatan (6 Desa), ±30.000 Jiwa
Waktu 2006 - Sekarang
Aktor Penyebab PT JMI (Rajawali Group), Pakualam, Kabupaten, Presiden
Akar Rumput Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP)

02
Megaproyek Bandara Internasional

Lokasi Kulon Progo
Luas/Jumlah ±11.000 Jiwa, 6 Desa
Waktu 2012 - Sekarang
Aktor Penyebab Kadipaten (Pakualam), Kabupaten, PT Angkasa Pura, PT CVK (India)
Akar Rumput Wahana Tri Tunggal, Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT), Masyarakat Peduli Kulonprogo (MPK)

03
Penggusuran Pemukiman Warga

Lokasi Parangkusumo
Luas/Jumlah ±5000
Waktu 2007 - Sekarang
Aktor Penyebab Kesultanan, Kabupaten
Akar Rumput Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran (ARMP)

04
Perampasan Hak Tanah Melalui Pembatalan Hak Milik Atas Tanah

Lokasi Pundungsari, Kecamatan Semih, Gunungkidul
Luas/Jumlah ±150 Persil (Sertifikat)
Waktu 2010
Aktor Penyebab Kesultanan, BPN Kabupaten Gunungkidul
Akar Rumput Warga Desa Pundungsari

05
Penggusuran Sekelompok Warga

Lokasi Suryowijayan
Luas/Jumlah ±500 m^2, 5 Warga
Waktu 2012
Aktor Penyebab Kesultanan
Akar Rumput Masyarakat Suryowijayan

06
Pembangunan Apartemen di Kawasan Padat Penduduk

Lokasi Jalan Kaliurang Km 5
Luas/Jumlah 16.763 m^2 (Luas bangunan Apartemen), 1.660 m2 (Luas Lahan), kedalaman sumur 60 m (Mata air konsumsi warga pada kedalaman 10m)
Waktu 2014 - Sekarang
Aktor Penyebab Kabupaten, PT Bukit Alam Permata
Akar Rumput Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara (PWKTAU)

07
Perampasan Hak Tanah Melalui Perubahan Status Hak Guna Bangunan

Lokasi Jalan Solo, Kotabaru, Malioboro
Luas/Jumlah 2 Sertifikat (yang diketahui karena kesediaan korban)
Waktu 2014
Aktor Penyebab Kesultanan, BPN Kabupaten/Kota
Akar Rumput Masyarakat setempat

08
Revitalisasi Kantor Kepatihan yang Berdampak Penggusuran

Lokasi Suryatmajan
Luas/Jumlah Belum diketahui
Waktu 2012 - Sekarang
Aktor Penyebab Pemerintahan Provinsi
Akar Rumput Paguyuban Warga Suryatmajan

09
Diskriminasi Rasial/Etnis Melalui Pelarangan Hak Milik Atas Tanah

Lokasi Seluruh DIY
Luas/Jumlah Belum diketahui
Waktu 1975 - 1984 dan 1998 - Sekarang
Aktor Penyebab Gubenur, BPN Kanwil
Akar Rumput Masyarakat Keturunan Etnis India, Indoeropa dan Tionghoa

10
Megaproyek Perampasan Hak Tanah Milik Desa Melalui Pembalikan Nama Sertifikat

Lokasi Seluruh DIY
Luas/Jumlah Belum diketahui
Waktu Sejak 2014
Aktor Penyebab Gubenur
Akar Rumput Masyarakat di DIY